



GUBERNUR JAMBI

SAMBUTAN PADA ACARA

SEMINAR NASIONAL DAN PELATIHAN KEUANGAN: KEUANGAN BERKELANJUTAN

UNIVERSITAS JAMBI
Senin, 30 Mei 2022

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

*Yth. Rektor Univ. Jambi, Prof. H. Sutrisno, M.Sc.,
Ph.D.*

*Yth. Staf Khusus Kementerian Keuangan RI,
Prastowo Yustinus*

*Yth. Kepala LPPM IPB, Dr. Ir. Ernan Rustiadi.
M.Agr.*

Yth. Dekan FEB UNJA, Dr. H. Junaidi, SE., M.Si.

*Yth. Ketua LPPM UNJA, Dr. Ade Octavia, SE.,
MM*

*Yth. Komisioner OJK Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen, Dr. Frederica
Widyasari Dewi, SE., MBA*

*Yth. Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan, FEB
UNJA, Dr. Etik Umiyati, SE., M.Si.*

*Yth. Kapus Studi Agraria IPB, Dr. Bayu Eka
Yulian, SP., M.Si.*

Yth. Sdr. Direktur WALHI Jambi, Abdullah

*Yth. Sdr. Dir Eksekutif TuK Indonesia, Edi Sutrisno
hadirin undangan yang berbahagia*

Yang Pertama dan Utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya pada hari ini, kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak Ibu hadirin yang saya hormati

Upaya untuk peningkatan pengelolaan Lingkungan di Provinsi Jambi merupakan bagian dari prioritas Visi dan Misi Provinsi Jambi. Kehadiran misi tersebut berangkat dari potret pengalaman masa lalu dan tingginya kecenderungan perubahan fungsi lahan, yang pada gilirannya baik secara langsung maupun tidak langsung telah meningkatkan laju deforestasi yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap banyak hal terkait dengan hidup dan kehidupan di masa yang akan datang.

Menurut *Global Forest Watch*, Provinsi Jambi telah kehilangan tutupan hutan sebanyak 1,67 juta hektar selama periode 2001-2020 dengan beragam sebab terutama berkaitan dengan aktivitas ekonomi baik oleh para pengusaha maupun oleh masyarakat kita sendiri.

Kehilangan ini menjadikan Provinsi Jambi berada pada peringkat kelima dari 10 besar Provinsi di Indonesia yang mengalami deforestasi tertinggi selama periode tersebut.

Deforestasi di Provinsi Jambi, selain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, juga merupakan akibat dari pendekatan pembangunan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer yang melibatkan tenaga kerja hampir mencapai 50% dari total angkatan kerja. Pada tahun 2021 lalu, sumbangsih pertumbuhan ekonomi (ADHB) sektor ini berada pada kisaran cukup tinggi, yaitu 20,58%.

Bahkan, secara kumulatif, deforestasi yang terjadi bukanlah sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi, selain masalah-masalah bencana yang seringkali disebabkan oleh adanya perubahan siklus hidrologi, dampak deforestasi

juga telah menyebabkan peningkatan emisi karbon yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi atau dikenal dengan istilah pemanasan global. Pemanasan global pada gilirannya telah mengubah kondisi iklim. Perubahan kondisi iklim inilah yang kemudian memberikan pengaruh negatif terhadap produktivitas sektor pertanian dalam artian luas.

Oleh karena itu, sejak 2018, Pemerintah Provinsi Jambi telah mencoba melakukan upaya untuk mengubah pendekatan pembangunan di masa yang akan datang. Hasilnya adalah sebuah dokumen peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau 2045. Terdapat 3 Skenario penting dari dokumen tersebut:

1. Pertumbuhan PDRB diproyeksikan meningkat, yaitu dari prakiraan sebesar 500 T BAU menjadi 575 T pada tahun 2045;

2. Emisi GRK diproyeksikan menurun, yaitu dari 49,30 juta ton CO₂ menjadi berkisar 43,83 juta ton CO₂. Sedangkan intensitas emisi GRK yang membebani PDRB diproyeksikan menurun dari 2,04 juta ton CO₂ eq/Juta Rupiah PDRB menjadi berkisar antara 1,43-1,80 juta ton CO₂ eq/juta Rupiah PDRB. Tergantung skenario yang digunakan. Skenario-skenario tersebut adalah a.Pengalokasian tata guna lahan; b.Skenario a ditambah dengan perbaikan produktivitas, diversifikasi produk, rantai pasar dan konektivitas; dan c.Skenario a dan b ditambah dengan peningkatan skala ekonomi melalui industri hilir.
3. Serapan Tenaga Kerja diproyeksikan meningkat, yaitu dari sekitar 21 juta menjadi 26 juta.

Saudara Saudara Hadirin yang Saya hormati,

Dalam kaitannya dengan implementasi skenario tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jambi telah bersepakat bersama Kementerian KLHK untuk mengelola proyek pengelolaan lahan secara berkelanjutan yang disebut sebagai BioCF. Hasilnya akan digunakan untuk mendapatkan insentif carbon sebesar 70 Juta USD dari negara-negara di Eropa, dimana saat ini dananya dikelola dan akan disalurkan oleh Bank Dunia kepada Provinsi Jambi setelah para pihak menyepakati, menandatangani, dan melaksanakan isi dari butir-butir *Emission Reduction Program Document* sehingga Insha Allah insentif tersebut ditargetkan sudah dapat dibayarkan mulai tahun 2023 yang akan datang.

Untuk mendapatkan insentif tersebut, bahkan Bank Dunia telah siap menggelontorkan dana sebesar 13,5 juta USD diluar insentif

sebesar 70 juta USD tersebut bagi Provinsi Jambi yang disalurkan secara bertahap selama 3 tahun sejak 2022 untuk kegiatan yang disebut dengan *Pre-Investment Project* dengan pola kombinasi antara *reimbursement* dan *on-granting*.

Sebagai informasi, 70% dari total Insentif tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang wilayahnya masuk dan merupakan lokasi proyek. Sisanya digunakan untuk pembiayaan kelembagaan termasuk dukungan Perguruan Tinggi, seperti kegiatan seminar pada hari ini, atau juga dapat berbentuk kegiatan-kegiatan penelitian yang terkait upaya pengurangan emisi yang dilakukan di kampus untuk digunakan dalam mendukung proyek dimaksud.

Saya berharap semoga insentif ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para akademisi Universitas Jambi guna memberikan sumbangsih yang berarti bagi kegiatan pembangunan daerah

ke depan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan yang dibarengi dengan perlindungan lingkungan di Provinsi Jambi khususnya.

Bapak Ibu hadirin yang Saya Muliaikan,

BioCF dapat dianggap sebagai cikal bakal dari ide lama yang dikenal dengan istilah Perdagangan Carbon (*Carbon Trade*), dimana konsepnya adalah negara-negara maju akan membayar sejumlah dolar tertentu untuk setiap ton CO₂ yang diserap karena pengelolaan lingkungan terutama dalam hal mempertahankan tutupan lahan. Pola kerja *tri partij* antara Pemerintah Provinsi Jambi - KLHK - Bank Dunia dalam pengelolaan *BioCF* ini sebagian besar telah diadopsi Pemerintah dengan melahirkan beberapa regulasi terutama terkait dengan metodologi penyaluran dan pemanfaatan dana perdagangan

carbon. Oleh karena itu, dengan pengalaman yang sudah ada ini, Kita berharap ke depan dapat mengubah dan memanfaatkan skema *Carbon Fund* menjadi *Carbon Trade* yang tentunya akan lebih menguntungkan bagi kita, karena proses perdagangan akan lebih terbuka dan tentu saja akan ada penerapan mekanisme pasar yang lebih baik. Apalagi, jika isu pengelolaan keuangan berkelanjutan ini dapat meningkat menjadi APBD hijau (*green budgeting*), maka dapat dinyatakan bahwa Provinsi Jambi sudah maju jauh di depan.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada penyelenggaraan seminar ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional dan Pelatihan Keuangan dengan Tema Keuangan Berkelanjutan ini secara resmi Saya nyatakan dibuka.

Terima kasih kepada IPB, UNJA, WALHI dan Transformasi untuk Keadilan Indonesia yang

telah berkolaborasi untuk menyelenggarakan forum yang sangat bermanfaat ini. Semoga hasilnya sesuai harapan dan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja lebih baik menuju Jambi MANTAP 2026. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberkati kita semua, Amin Yarobbal Alamin.

Terima kasih

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Gubernur Jambi

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.